



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PUTRA SOLVA UTAMA
SMA IT BAITURROHMAN GARUT



Email : sma_it_baiturrohman@yahoo.co.id | NSS : 32021137054 | NPSN : 69856918
Kp. Solokpandan 01/ 02 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut Prov. Jawa Barat 44151 Kontak. 085 223 015 303

PENILAIAN SUMATIF TENGAH SEMESTER (PSTS)
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Satuan Pendidikan	: SMA IT BAITURROHMAN	Hari, Tanggal	: 5, Maret 2024
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)	Waktu	: 120 Menit
Kelas	: X (Sepuluh)	Jumlah soal	: PG 40
Nama	:		essay 5

Pilihlah salah satu alternative Jawaban Yang dianggap Paling Benar !

1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk

kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah

kekuasaan ...

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Eksekutif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah

kekuasaan ...

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan

oleh lembaga

A. MPR, DPR, DPRD dan DPD

B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang

Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, adalah kekuasaan ...

A. Konstitutif

B. Legislatif

C. Federatif

D. Yudikatif

E. Eksaminatif

5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan

mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ...

A. Menteri Keuangan RI

B. Dewan Perwakilan Daerah

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Gubernur Bank Indonesia

E. Badan Pemeriksa Keuangan

6. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945

adalah

A. Menetapkan dan mengesahkan APBN

B. Meberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan

C. Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen

D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain

E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain

7. Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut

UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam bentuk

A. Pemberian Grasi

B. Penentuan Pejabat Daerah

C. Pembuatan undang-undang

D. Pengangkatan Mentri Negara

E. Pengamandemenan UUD 1945

8. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala

eksekutif atau pemerintahan.

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung

jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial

ditandai pada nomor ...

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 5

D. 4 dan 6

E. 5 dan 6

9. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa

jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariat negara

E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,

hukum dan keamanan.

10. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

A Membentuk kabinet menteri

B Membahas rancangan undnag-undnag APBN

C Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN

D Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

E Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

11. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial

di Indonesia adalah.....

A Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

B Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

C Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada

presiden

D Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di

bawahnya

E Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan

pertimbangan DPR

12. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....

A Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara

B Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

C Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen

D Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

E Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, Kepala negara akan

membubarkan parlemen

13. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.

2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri

3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala

eksekutif atau pemerintahan.

4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung

jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial

ditandai pada nomor ...

A 1 dan 2

B 2 dan 3

C 3 dan 5

D 4 dan 6

E 5 dan 6

14. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan

Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai

Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai

ideologi terbuka adalah, kecuali

A Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak

langsung

B Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

15. Perhatikan data dibawah ini :

1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor

A 1 dan 2

B 1 dan 3

C 1 dan 4

D 2 dan 4

E 3 dan 4

16. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai

Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali

A Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

B Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.

D Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

E Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

17. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat

menumbuhkan sikap tersebut, Kecuali

A Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya

B Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia

C Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM

D Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute

E Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan

18. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !

6) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri

7) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia

8) melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah

ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya

9) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta

mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh

nomor

A. 1) dan 2)

B. 1) dan 3)

C. 2) dan 3)

D. 3) dan 4)

E. 3) dan 5)

19. Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai

material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat

objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut

A Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri

B nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat

C sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal

D nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa

E nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius

20. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan

Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai

Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai

ideologi terbuka adalah, kecuali

A Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

B Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak

langsung

C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap

perikehidupan

D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan

bangsa dewasa ini

E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi

sekarang ini

21. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman...

A. Kementerian Pariwisata

B. Kementerian Perhubungan

C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Kementerian Kelautan dan Perikanan

E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

22. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian

koordinator yang bertugas...

A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang

berada di dalam lingkup tugasnya.

B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,

D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas

disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

23. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian....

A. Dalam Negeri dan luar negeri

B. Keuangan dan Ketenagakerjaan

C. Kesehatan dan Kementerian Sosial

D. Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata

E. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

24. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kementerian ...

A. Dalam Negeri dan luar negeri

B. Keuangan dan Ketenagakerjaan

C. Kesehatan dan Kementerian Sosial

D. Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata

E. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

25. Keberadaan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) diatur oleh Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-

Departemen. Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

yang ada di Indonesia, yaitu:

A. Badan Intelijen Negara (BIN)

B. Badan Intelijen Negara (BIN)

C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

E. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

26. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada

dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ...

A. Badan Intelijen Negara (BIN)

B. Badan Intelijen Negara (BIN)

C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

E. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

27. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada

dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi adalah ...

A. Badan Intelijen Negara (BIN)

B. Badan Intelijen Negara (BIN)

C. Badan SAR Nasional (BASARNAS)

D. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

E. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

28. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil

pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaakn UUD

Negara RI Tahun 1945 ...

A. terjadinya pergantian kepemimpinan nasional

B. terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik

C. membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

E. hanya dapat dialkukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

29. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan pokok

kaedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut Hubungan antara

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah ...

A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945

B. Inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara

fundamental adalah Pancasila.

C. Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya

deklarasi HAM sedunia

D. Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia.

E. Inti sari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara

fundamental adalah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

30. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai

Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali

A. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

B. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.

D. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

E. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

31. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah

....

A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang

berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang

dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan

ZEE

B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang

berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan

dengan undang undang.

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang

berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas

kontinen Asia dan Australia

D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang

berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah

nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya

E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang

berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis

32. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang

bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak

kembali." bermakna

A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya

kapan saja dan dapat tinggal dimana saja

B. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah

Negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia

C. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam

waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri

D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa

surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagi

E. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk

meninggalkan maupun kembali

33. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari....

A. Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam

dan Filipina

B. Samudera Hindia dan perairan negara India

C. Daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik

D. Wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia

E. Samudera hindia dan benua Australia

34. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat

dalam peraturan negara, yakni....

A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960

B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS

C. Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957

D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A

E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan

35. Orang yang tinggal berdiam dalam suatu negara adalah....

A. pendukung negara

B. penduduk negara

C. warga negara

D. rakyat negara

E. kaula negara

36. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa

lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian tersebut

tercantum dalam UUD 1945....

A. Pasal 27 Ayat 1

B. Pasal 27 Ayat 2

C. Pasal 26 Ayat 1

D. Pasal 26 Ayat 2

E. Pasal 26 Ayat 3

37. Faktor yang membedakan penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia

adalah....

A. faktor usia

B. faktor studi

C. faktor tinggi badan

D. faktor jangka waktu

E. faktor tempat kerja keturunan

38. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota

penuh suatu negara. Oleh karena itu seorang warga negara... .

A. tidak memiliki semua hak dan kewajiban sebagai anggota negara.

B. tidak dituntut untuk memberikan kesetiaan kepada negaranya.

C. tidak menerima perlindungan dari negara.

D. tidak dapat menikmati hak ikut serta dalam proses politik.

E. tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar

negeri

39. Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundangan kewarganegaraan Indonesia

adalah...

A. UU No. 12 Tahun 2006

- B. UU No. 4 Tahun 1979
- C. UU No. 62 Tahun 1958
- D. KMB 27 Desember 1949
- E. UU No. 3 Tahun 1946

40. Salah satu syarat warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia adalah

berumur...

- A. 14 tahun
- B. 15 tahun
- C. 16 tahun
- D. 17 tahun
- E. 18 tahun

Soal 1: Sistem Pemerintahan Indonesia

Jelaskan perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sebutkan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem tersebut.

Soal 2: Pancasila sebagai Dasar Negara

Jelaskan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?

Soal 3: Globalisasi dan Dampaknya

Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Jelaskan dampak positif dan negatif globalisasi terhadap ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Soal 4: Partisipasi Politik Pemuda

Mengapa partisipasi politik pemuda dianggap penting dalam pembangunan negara? Jelaskan peran pemuda dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Soal 5: Hak Asasi Manusia di Indonesia

Jelaskan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sejak era reformasi. Sebutkan tantangan dan upaya yang dilakukan untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia di negara ini.